



**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**LAPORAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
MENGIKUTI SIDANG MAJELIS UMUM PBB TENTERANG MDGS**

Sesuai dengan penugasan Presiden RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ditunjuk sebagai *Alternate Leader* Delegasi RI pada Sidang Majelis Umum PBB ke 65 tentang MDGs yang diselenggarakan pada tanggal 20-22 September 2010 di Kantor PBB New York. Pimpinan Delegasi RI adalah Menteri Luar Negeri RI.

Selama pelaksanaan Summit tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas antara lain mengikuti (1) Pembukaan Sidang Tingkat Tinggi tentang MDGs, (2) Peluncuran Dokumen Laporan MDGs di Asia-Pasific 2010-2011, (3) Kerjasama Regional Komisi-komisi PBB tentang Upaya Pencapaian MDGs di Kawasan Asia Pasific, (4) Pertemuan Tingkat Tinggi Anggota PBB membahas Promosi Pembangunan Berkelanjutan (*Promoting Sustainable Development*), (5) Pembukaan Sidang Tingkat Tinggi tentang Biodiversity, (6) Pertemuan UNSG tentang Inisiatif Global dalam Strategi Kesehatan Ibu dan Anak (MDG 4 dan 5), (7) Pertemuan Bilateral dengan AusAID dan UNICEF.

Pada Acara Pembukaan Sidang (*High-Level Plenary Meeting on MDGs*) disampaikan berbagai pernyataan dari Sekjen PBB, Presiden ECOSOC, Presiden Bank Dunia, Managing Director IMF, Dirjen WTO, Sekjen UNCTAD, dan UNDP Adminsitrator. Pada intinya pernyataan yang disampaikan menjelaskan tentang pencapaian tujuan MDGs sampai saat ini, tantangan-tantangan yang dihadapi yang antara lain kemiskinan, kesehatan ibu dan anak penyediaan air bersih dan sanitasi dan rencana akselesari pencapaian MDGs ke depan.

Pada Peluncuran Dokumen Laporan MDGs di Asia-Pasific 2010-2011 (*Side Event for High Launch of the Asia Pacific MDGs Report 2010-2011*) yang diselenggarakan oleh ESCAP/ADB/UNDP kami menyampaikan *statement* berkaitan dengan: (1) pencapaian MDGs di Regional Asia dan Pasific, (2) tantangan untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, (3) penjelasan hasil pertemuan khusus MDGs Regional Asia Pasific di Jakarta pada tanggal 3-4 Agustus 2010 tentang upaya penurunan kemiskinan, memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan pembiayaan, meningkatkan kerjasama regional di bidang perdagangan, teknologi, infrastruktur, dan pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan *pro-poor* dan *pro-growth*, lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Dapat kami laporkan pula bahwa dalam laporan tersebut data dan informasi tentang kinerja target MDGs Indonesia sejalan dengan kinerja target MDGs yang dilaporkan dalam Laporan Pencapaian MDGs Indonesia Tahun 2010.

Pada Pertemuan Kerjasama Regional Komisi-komisi PBB tentang Upaya Pencapaian MDGs di Kawasan Asia Pasific/*Joint Event Regional Commision of the UN (ECA, ECE, ECLAC, ESCAP, ECLAC)* kami menyampaikan hasil pertemuan *MDGs Regional for Asia Pacific* di Jakarta pada tanggal 3-4 Agustus 2010 dalam bentuk Deklarasi Jakarta, mencakup (1) pengalaman sukses dalam pencapaian MDGs di kawasan Asia Pasific, (2) masih terjadinya disparitas pencapaian MDGs antar negara yang harus diatasi, (3) pentingnya tukar pengalaman antar negara dalam mencapai tujuan MDGs, (4)

menjelaskan pertemuan khusus tingkat menteri pada tanggal 3-4 Agustus di Jakarta untuk mengkoordinasikan dan kerjasama antarnegara pada Regional Asia Pasific untuk mencapai target MDGs 2015, meliputi peningkatan pembiayaan, kerjasama internasional, terutama kerjasama selatan-selatan, (5) menjelaskan komitmen Indonesia yang tinggi dalam mencapai target MDGs dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010, yang berisikan Peta Jalan MDGs untuk 5 tahun kedepan, Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Target MDGs di Daerah, Meningkatkan alokasi pembiayaan untuk MDGs, serta menggalang kemitraan pemerintah dengan swasta.

Pada Pertemuan Tingkat Tinggi Anggota PBB membahas Promosi Pembangunan Berkelanjutan (*High-Level Plenary Meeting on MDGs Round Table 3 on Promoting Sustainable Development*) kami menyampaikan statement tentang berbagai kebijakan Indonesia antara lain meliputi : (1) peningkatan area konservasi hutan dan laut, (2) pemberantasan pembalakan hutan, (3) pembentukan unit manajemen kehutanan dan mekanisme pembiayaan untuk meningkatkan pengelolaan hutan, (4) mitigasi perubahan iklim global untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada program kementerian/lembaga, (5) memperluas konservasi areal hutan mangrove dan terumbu karang di kawasan pesisir, (6) peningkatan konservasi biodiversity, (7) pengembangan ekosistem dasar untuk area konservasi, pengembangan konservasi spesies dan genetik, serta (8) pengawasan kawasan hutan, dan pengembangan *eco-tourism*.

Pada Pembukaan Sidang Tingkat Tinggi tentang Biodiversity (*Opening High Level Event on Biodiversity*) kami menyampaikan statement tentang: (1) Rencana Aksi Strategis 2003-2020 tentang Biodiversity sebagai pedoman nasional manajemen biodiversity di Indonesia, (2) Negosiasi protokol terhadap akses dan *benefit sharing dari genetic resources dan associated traditional knowledge* sebagai proses yang penting dalam konvensi biological, (3) Rencana pelaksanaan *Internasional Year of Biodiversity* di Nagoya Jepang sebagai momentum untuk konservasi biodiversity dan menurunkan *biodiversity loss*, (4) kaitan antara *green economy* dan pemanfaatan potensi biodiversity, keterkaitan antara *REED Plus* dengan *forest degradation* dan *valuation of biodiversity*, (5) menghimbau *Geneva Ministerial Biodiversity* untuk melakukan langkah-langkah nyata sebagai tindak lanjut dari deklarasi bulan September 2010 oleh Menteri yang bertanggung jawab untuk biodiversity.

Pada Pertemuan *UNSG* tentang Inisiatif Global dalam Strategi Kesehatan Ibu dan Anak (*UNSG Initiative on Global Strategy for Women's and Children Health /MDGS 4 dan 5*), kami menyampaikan statement tentang inisiatif untuk mobilisasi upaya dan kerjasama internasional untuk mencapai Target MDGs 4 dan 5 yang mencakup (1) menjamin pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih secara universal pada tahun 2015 dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, (2) pada tahun 2011 pemerintah menjamin setidaknya 1,5 juta kelahiran ibu melahirkan dari keluarga miskin dijamin oleh pemerintah, (3) meningkatkan anggaran kesehatan sebesar \$ 556 juta pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan di 552 rumah sakit, 8.898 puskesmas, dan 52.000 pos kesehatan desa/polindes. Komitmen Indonesia ini telah merupakan bagian dari *The Global Strategy for Womens and Children's Health* yang diluncurkan oleh Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon sebagai upaya khusus untuk mencapai target MDG 4 dan 5 pada tahun 2015.

Pada Pertemuan Bilateral dengan AusAID, kami menyampaikan (1) ucapan terima kasih atas kerjasama pemerintah RI dan pemerintah Australia di bidang pendidikan, perubahan iklim, kesehatan, gender, penanggulangan bencana, infrastruktur, desentralisasi, penanggulangan kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan

yang baik, (2) menjelaskan pentingnya kerjasama RI-Australia untuk mempercepat pencapaian target MDGs pada tahun 2015, seperti ditetapkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2010, terutama dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk mencapai target MDGs. Pada pertemuan tersebut AusAid mengungkapkan pentingnya peran dan kerjasama dengan Indonesia dalam memajukan kesejahteraan di kawasan. Kerjasama yang akan digalang terutama untuk pelatihan pegawai negeri Timor Leste dan rekonstruksi bencana banjir yang melanda Pakistan. Khusus untuk rekonstruksi penanggulangan banjir di Pakistan akan dilakukan melalui antara lain pengiriman tenaga-tenaga Pakistan untuk belajar dari penanganan bencana tsunami di Aceh oleh BRR.

Pada Pertemuan Bilateral dengan UNICEF, kami menyampaikan (1) ucapan terima kasih atas kerjasama RI-UNICEF yang sudah berlangsung sejak tahun 1966 dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, (2) menjelaskan kerjasama RI-UNICEF 2006-2010 yang meliputi kelangsungan hidup dan perkembangan anak, kebijakan sosial dan perlindungan anak, pengembangan pendidikan anak dan remaja, dan komunikasi, yang telah dilaksanakan di 14 provinsi dan 86 kabupaten, (3) mendiskusikan beberapa lingkungan strategis yang akan mempengaruhi kerangka kerjasama RI-UNICEF lima tahun kedepan yang meliputi status Indonesia yang sudah tergolong *middle income country*, memperkuat kebijakan desentralisasi, lingkungan politik yang lebih demokratis, perkuatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, implikasi terjadinya urbanisasi dan posisi Indonesia yang rawan bencana alam. Selanjutnya Executive Director UNICEF menjelaskan (1) perlunya sinergi kerjasama antar berbagai *UN Agencies*, terutama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak (MDGs 4 dan 5), (2) menitikberatkan pada pelayanan kesehatan anak pada kelompok masyarakat miskin dan termarjinalkan untuk mengatasi masalah *in-equity*, (3) penerapan strategi yang berbeda pada tipologi masyarakat yang berbeda, agar pendekatan lebih *cost effective* melalui *equity based study*, (4) memperkuat program-program tepat guna, seperti memperluas cakupan vaksinasi, promosi kebiasaan cuci tangan sebagai pola hidup bersih dan sehat, dan pendidikan gizi. Berbagai model program tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.